

ABSTRAK

Nur Annisa, Andi Rosdianti Razak dan Nursaleh Hartaman Implementasi Kebijakan Electronic Government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Pangkep.

E-government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung oleh internet untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di Indonesia, e-government diterapkan untuk memperkuat pemerintahan yang peka terhadap permintaan dan harapan masyarakat, meningkatkan pemanfaatan serta transparansi informasi, serta mendorong keterlibatan publik dalam penyelenggaraan pemerintah.

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan electronic government di dinas kependudukan dan catatan sipil di kabupaten pangkep.

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif suatu keadaan yang mencerminkan realitas atau situasi yang berlangsung secara teratur dan tepat mengenai Implementasi Electronic Government Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep berkaitan dengan peristiwa yang diteliti. Penelitian kualitatif fokus pada satu variabel saja tanpa melakukan perbandingan atau mengaitkan dengan variabel lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan e-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep dengan menggunakan model Edward III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan e-Government secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Keempat indikator implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, saling berkaitan dan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, e-Government, Pelayanan Publik, Disdukcapil*

ABSTRACT

Nur Annisa, Andi Rosdianti Razak and Nursaleh Hartaman Implementation of Electronic Government Policy at the Population and Civil Registry Service in Pangkep Regency.

E-government is the application of information and communication technology supported by the internet to create more efficient government and improve public services. In Indonesia, e-government is implemented to strengthen government responsiveness to public demands and expectations, increase the use and transparency of information, and encourage public involvement in government administration.

The aim of this research is to find out how the electronic government policy is implemented in the population and civil registration service in Pangkep district.

This type of research falls into the qualitative research category, reflecting a reality or situation that occurs regularly and accurately regarding the implementation of Electronic Government at the Pangkep Regency Population and Civil Registry Service, related to the event being studied. Qualitative research focuses on a single variable without comparing or linking it to other variables.

Based on the results of research and discussion regarding the implementation of e-Government policies at the Population and Civil Registration Office of Pangkep Regency using the Edward III model, it can be concluded that the implementation of e-Government policies has generally been running quite well, but not yet fully optimal. The four indicators of policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, are interrelated and influence the effectiveness of electronic-based population administration services.

Keywords: *Policy Implementation, e-Government, Public Services, Disdukcapil*